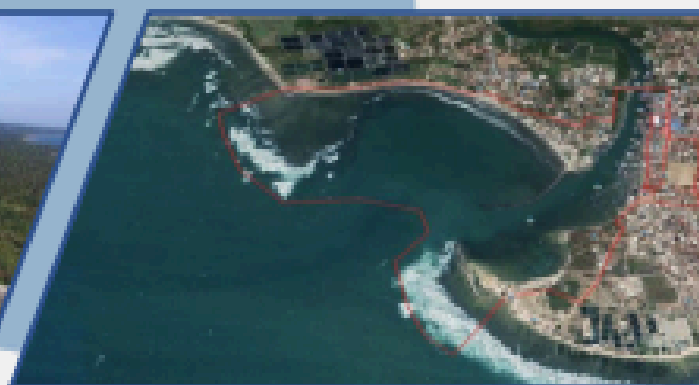
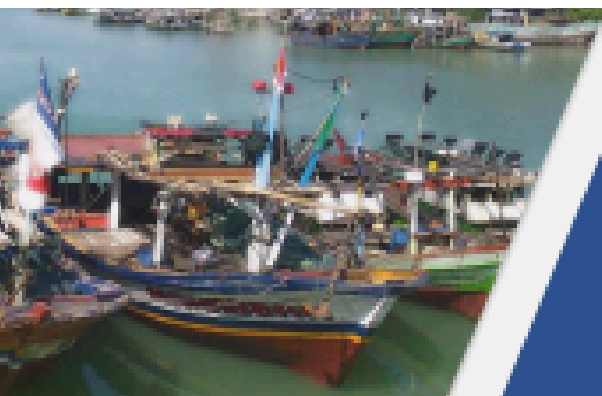


LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022 022



**DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

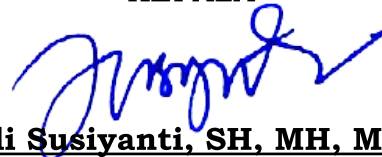
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi. Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, melalui Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2022 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan

pelaksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Serang, Januari 2023

KEPALA



Eli Susiyanti, SH, MH, MM

Pembina Utama Muda – IV.c

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi	3
1.4 Sumber Daya OPD	7
1.5 Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Strategi dan Arah Kebijakan	10
2.2 Program dan Indikator Kegiatan	13
2.3 Perjanjian Kinerja	23
2.4 Rencana Anggaran.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	28
3.2 Pengukuran dan Analisi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	41
3.3 Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Banten terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada pada pintu gerbang utama Pulau Jawa di bagian barat, tepatnya melalui Pelabuhan Merak. Kawasan pesisir Provinsi Banten membentang dari pantai utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa hingga ke pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan panjang total garis pantai mencapai 500 km. Posisi tersebut menganugerahi Provinsi Banten dengan potensi sumberdaya ikan yang melimpah dan beragam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan.

Perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan harus disusun secara matang yang berisi langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan yang ada. Keberadaan rencana pembangunan perikanan dan kelautan tersebut diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi pembangunan perikanan dan kelautan untuk menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor penggerak ekonomi utama di Provinsi Banten yang membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Dalam rangka mewujudkan reformasi dan birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang meliputi pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan professional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, serta pembinaan, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat

dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten. Terhadap hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten proaktif menciptakan system dan iklim kerja dan organisasi agar lebih produktif dan unsur pendukung koordinator seluruh kegiatan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tahun Anggaran 2022 meliputi data realisasi capaian anggaran, indicator kinerja utama, rencana aksi, rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja serta lainnya yang mendukung pada program sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2022 disusun dengan maksud dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten kepada Gubernur Banten dan pihak yang berkepentingan,

sebagai bentuk pertanggung-jawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);

2. Memberikan informasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada peraturan perundangan, kebijakan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk tahun berikutnya melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 80 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DKP Provinsi Banten dan telah diubah terakhir kali dengan Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten maka uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKP Provinsi Banten diuraikan sebagai berikut. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, DKP Provinsi Banten mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan deradikasi penyakit ikan di darat;

4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut urusan provinsi;
8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
10. Pelayanan administratif; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala dinas

2. Sekretaris, membawahi:

- a. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- c. Kepala sub bagian keuangan

3. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahi:

- a. Seksi pengelolaan ruang laut dan konservasi
- b. Seksi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Seksi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:

- a. Seksi kepelabuhanan perikanan
- b. Seksi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan
- c. Seksi pengelolaan sumber daya ikan

5. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing, membawahi:

- a. Seksi investasi dan promosi
- b. Seksi bina mutu dan diversifikasi
- c. Seksi usaha dan kelembagaan perikanan budidaya

6. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi:

- a. Seksi pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan
- b. Seksi pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan
- c. Seksi penanganan pelanggaran

7. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara, membawahi:

- a. Sub bagian tata usaha
- b. Seksi pengelolaan dan pengendalian laut, pasir dan pulau-pulau kecil
- c. Seksi pelayanan usaha jasa kelautan

**8. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Selatan, membawahi:**

- a. Sub bagian tata usaha,
- b. Seksi pengelolaan dan pengendalian laut, pasir dan pulau-pulau kecil
- c. Seksi pelayanan usaha jasa kelautan

**9. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil
Perikanan, membawahi:**

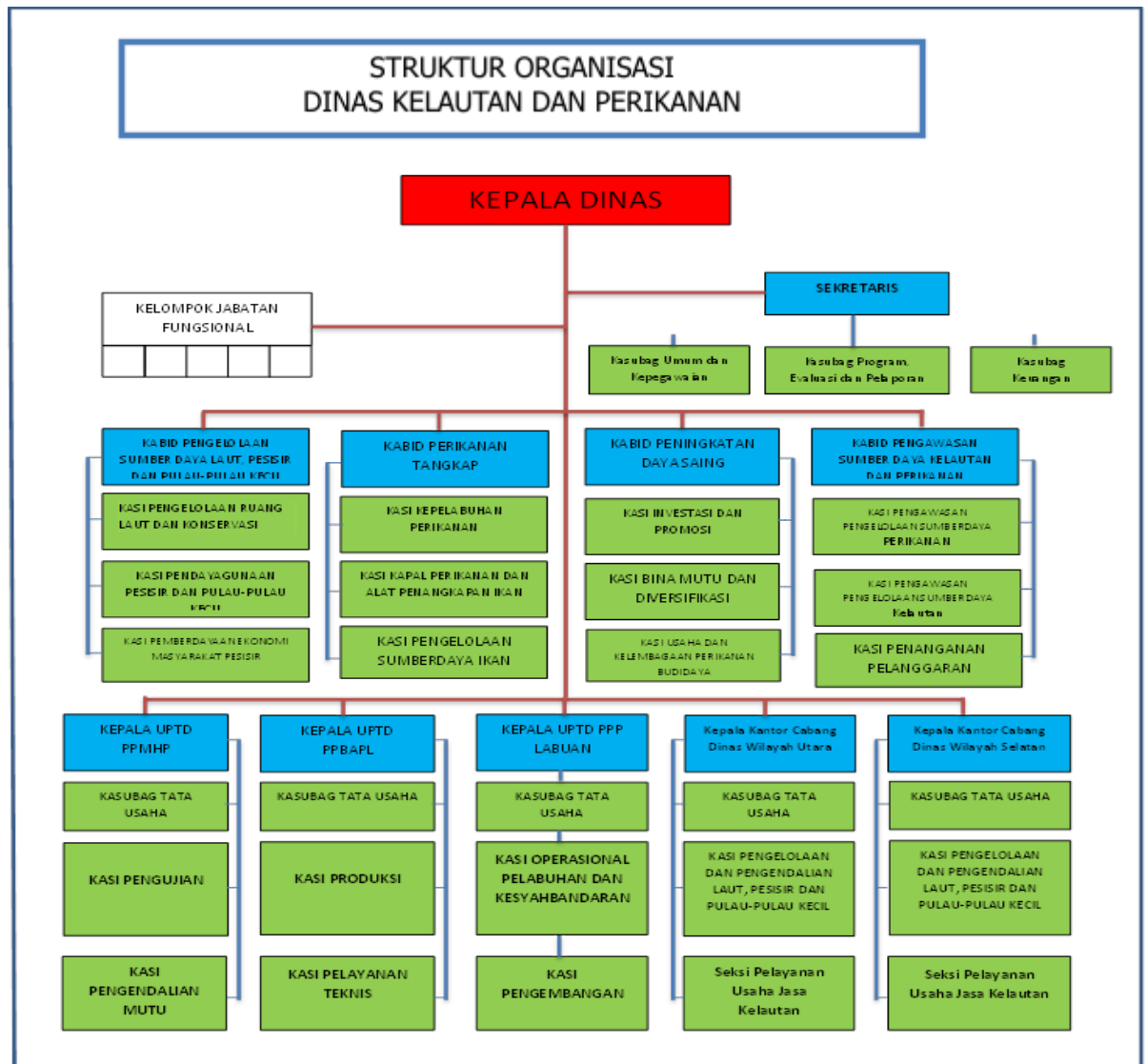
- a. Sub bagian tata usaha
- b. Seksi pengujian
- c. Seksi pengendalian mutu.

**10. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air
Payau dan Laut, membawahi:**

- a. Sub bagian tata usaha
- b. Seksi produksi
- c. Seksi pelayanan teknis

**11. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan,
membawahi:**

- a. Sub bagian tata usaha,
- b. Seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran
- c. Seksi tata kelola dan pelayanan usaha.



Gambar 1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
(PERGUB No. 83 Tahun 2016)

1.4 Sumber Daya OPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, DKP Provinsi Banten didukung oleh aparatur sumberdaya manusia yang berkualitas. Ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten, berpengalaman dan berkomitmen tinggi sangat diperlukan agar program yang telah disusun dapat dijalankan dengan optimal dan

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komposisi sumberdaya manusia yang ada di DKP Provinsi Banten disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Komposisi Sumberdaya Manusia DKP Provinsi Banten

No	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah Aparatur		
	- Laki-laki	67	Orang
	- Perempuan	37	Orang
2	Berdasarkan Status Kepegawaian		
	- Aparatur Sipil Negara (ASN)	104	Orang
	- Aparatur Non ASN	127	Orang
	- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0	Orang
	- Tenaga Harian Lepas	0	Orang
3	Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	- Pasca Sarjana (S3)	0	Orang
	- Pasca Sarjana (S2)	30	Orang
	- Sarjana (S1)	48	Orang
	- Diploma IV	4	Orang
	- Diploma III	6	Orang
	- SLTA / Sederajat	16	Orang
	- SLTP / Sederajat	0	Orang
4	Berdasarkan Golongan/Pangkat		
	- IV a / Pembina	10	Orang
	- IV b / Pembina Tingkat I	6	Orang
	- IV c / Pembina Utama Muda	0	Orang
	- IV d / Pembina Utama Madya	0	Orang
	- IV e / Pembina Utama	0	Orang
	- III a / Penata Muda	9	Orang
	- III b/ Penata Muda Tingkat I	6	Orang
	- III c / Penata	26	Orang
	- III d / Penata Tingkat I	30	Orang
	- II a / Pengatur Muda	0	Orang
	- II b / Pengatur Muda Tingkat I	14	Orang
	- II c / Pengatur	0	Orang
	- II d / Pengatur Tingkat I	4	Orang
5	Berdasarkan Jabatan/Eselonering		

- Esselon II	1	Orang
- Esselon III	8	Orang
- Esselon IV	28	Orang
- Jabatan Fungsional Tertentu	9	Orang
- Jabatan Fungsional Umum	58	Orang

1.5 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kelautan dan Perikanan, antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat Konsumsi Ikan yang tidak berbanding lurus dengan produksi perikanan di daerah;
2. Rendahnya peningkatan volume produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
3. Masih maraknya operasionalisasi alat tangkap yang dilarang;
4. Rendahnya nilai tambah produk olahan hasil perikanan;
5. Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan belum memenuhi kriteria standar, khususnya untuk fasilitas pokok dan fungsional;
6. Belum optimalnya pelayanan uji untuk produk olahan hasil perikanan;
7. Belum optimalnya ketersediaan benih dan induk berkualitas unggul untuk komoditas unggulan perikanan budidaya Provinsi Banten.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Memasuki periode pembangunan Provinsi Banten pada lima tahun (2017-2022), Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya Visi Pembangunan Provinsi Banten yaitu :

“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi tersebut, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah :

1. Misi ke-1 : **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)**;

Tujuan misi ke-1 yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.

2. Misi ke-5, **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.**

Tujuan misi ke-5 yaitu meningkatnya perekonomian Banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, kecukupan pangan

dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan.

Arah kebijakan yang dituangkan dalam Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

- a. Arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Banten dalam rangka mencapai **Misi 1 : Menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)** yaitu dengan kebijakan melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan, sementara kebijakan yang dituangkan dalam Renstra yaitu dengan melakukan standarisasi layanan prima kepada masyarakat dan stakeholder oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
- b. Arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Banten dalam rangka mencapai **Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi** yaitu melalui kebijakan meningkatkan laju pertumbuhan produksi perikanan baik itu produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya. Adapun arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu melalui revitalisasi sarana dan prasarana fasilitas di pelabuhan perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Selanjutnya Sasaran, Strategis dan Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2022, sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.1

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

VISI: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah			
Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standard operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
Misi: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			
Meningkatnya Perekonomian secara berkelanjutan berbasis potensi ekonomi lokal	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan yang Optimal	Meningkatkan produksi, nilai tambah daya saing produk kelautan dan perikanan	Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan

2.2 Program dan Indikator Kegiatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022, disebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berperan dalam mencapai tujuan pada Misi ke-1 yaitu Menciptakan tata kelola yang baik (*Good Governance*), dan Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang telah disandingkan dengan Pemutakhiran Kepmen 050 Tahun 2020, **fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan berada kedalam Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**, memiliki 6 (enam) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
5. Program Peningkatan Daya Saing;
6. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Dari enam program yang telah ditetapkan, terdapat 59 (Lima Puluh Sembilan) kegiatan dan 160 (Seratus Enam Puluh) sub kegiatan.

Tabel 2.2
Program dan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
				4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Persentase terwujudnya penat usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3. Pelaksanaan Penatausahaan dan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD/KCD)	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD/KCD)	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Peningkatan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	9.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di bawah 12 mil diluar minyak gas dan bumi
				2. Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin Pengelolaan Ruang Laut di bawah 12 mil diluar minyak gas dan bumi
		10.	Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan	1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			gas bumi	Kecil
				2. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau=Pulau Kecil
		11.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Persentase Produksi Perikanan dan capaian kinerja pelayanan usaha kepelabuhanan setiap tahunnya	12.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	1. Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan
				2. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
				3. Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap
		13.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal ukuran 10 – 30 GT	1. Penetapan dan persyaratan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan 10-30 GT
				2. Penerbitan rekomendasi izin izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan 10-30 GT
		14.	Penetapan Lokasi Pembangunan saera Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1. Penyediaan Sarpras Pelabuhan Perikanan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Provinsi	
				2. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tarcapainya Persentase Luas Laut Yang Terawas serta meningkat setiap tahunnya dan	15.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
				2. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
				3. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
				4. Penumbuhan dan Pengembangan kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
		16.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya.
				3. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya.
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Ruang Lingkup Pengujian dan Mutu Hasil Perikanan	17.	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2. Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		18.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
				2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
		19.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		20.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
		21.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2. Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2022 perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2022
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang Optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	4,93

--	--	--	--

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Program Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan	8,61 %
			Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Usaha Kepelabuhanan	100 %
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas Laut yang terawasi	35 %
		Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Nilai Tukar Nelayan	120
			Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Banten	100 %
			Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Banten	100 %
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Benih Ikan Laut dan Payau	1,5 Milyar Ekor

		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI	100 %
			Jumlah Ruang Lingkup Pengujian dan Mutu Hasil Perikanan pada ISO 17025	1 Parameter

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan penetapan APBD Provinsi Banten Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.78.285.837.000,-.

Melalui mekanisme perubahan APBD 2022, berdasarkan PMK Nomor 140/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 170/PMK.07/2022 Tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 Periode I dan Periode II kepada 125 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Hal itu bertujuan untuk memacu Pemerintah daerah agar terus melakukan perbaikan kinerja daerah dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dimana penggunaannya disini untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, antaranya adalah untuk perlindungan sosial seperti bansos, kemudian dukungan dunia usaha terutama untuk mikro kecil dan menengah, dan atau upaya penurunan tingkat inflasi daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan melalui APBD Perubahan anggaran nya mengalami penyesuaian sehingga anggaran menjadi Rp. 79.502.451.000,- bertambah sebesar Rp. 1.216.614.000.

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No	Program	Anggaran APBD Murni 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	37.570.944.527	43.383.945.275
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	35.470.911.310	31.234.362.310
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.298.081.163	3.273.747.415
4	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.023.700.000	830.096.000
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	663.100.000	616.200.000
6	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	259.100.000	164.100.000

Perubahan belanja pada Anggaran Perubahan DKP Provinsi Banten Tahun 2022 mayoritas merupakan refocusing pada beberapa belanja perjalanan dinas serta belanja dokumen perencanaan pekerjaan fisik yang harus dialihkan menjadi belanja modal. Perubahan belanja tersebut dialihkan untuk belanja kebutuhan tunjangan kinerja pegawai yang semula dianggarkan selama 10 bulan menjadi 14 bulan pada Tahun 2022 dengan pagu alokasi tambahan sebesar Rp. 5.957.014.000,-.

Perubahan belanja tersebut berpengaruh terhadap perubahan target kinerja pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan. Target Kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi yang mengalami perubahan signifikan pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Target APBD Murni	Target APBD Perubahan
1	11 Dokumen Perencanaan	7 Dokumen Perencanaan
2	6 Paket Pekerjaan Fisik Pelabuhan Perikanan Binuangeun	5 Paket Pekerjaan Fisik Pelabuhan Perikanan Binuangeun
3	12 Paket Pekerjaan Fisik Pelabuhan Perikanan Cikeusik	9 Paket Pekerjaan Fisik Pelabuhan Perikanan Cikeusik

Perubahan indikator kinerja tersebut merupakan dampak dari reconfusing pada Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi sebesar Rp. 3.808.843.000,-.

Renja Perubahan DKP Provinsi Banten 2022 juga merencanakan pembuatan beberapa aplikasi penunjang kegiatan teknis seperti pembuatan aplikasi E-PPKP pada kegiatan Penerbitan Izin Kapal Perikanan Ukuran 10 – 30 GT serta aplikasi E-SILAUK pada kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut. Selain di kegiatan yang bersifat teknis, penyisiran pagu untuk kebutuhan pagu Perubahan Tahun 2022 juga menghilangkan beberapa kegiatan yang ada di tata usaha baik unit induk maupun UPTD/KCD lingkup DKP Provinsi Banten. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya yaitu pengadaan 1 unit kendaraan roda 4, sewa gedung bangunan UPTD PMHP serta pengurangan 1 paket pengadaan aset tetap dan 2 unit kontainer sampah di UPTD PPP Labuan. Penambahan lokasi kegiatan Gerakan Masyarakat Makan Ikan yang ditunjang melalui penyediaan bahan budidaya ikan

dalam ember merupakan tindak lanjut dari kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam mendukung kegiatan penuntasan stunting yang menjadi prioritas Pemerintahan Provinsi Banten.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan pada Bab ini menggambarkan keberhasilan ataupun ketidaktercapaian dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten baik capaian kinerja sasaran strategis yang hendak diwujudkan tahun 2022 maupun capaian realisasi keuangannya.

Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Perubahan Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$90.01 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$75.01 \leq 90.00$	Tinggi
3	$65.01 \leq 75.00$	Sedang
4	$50.01 \leq 65.00$	Rendah
5	≤ 50.00	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dan analisis capaian Kinerja berdasarkan Program Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Banten 2017-2022 yang telah disandingkan dengan Kepmen 050 Tahun 2020. Capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten juga mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Meningkatnya Perekonomian secara berkelanjutan berbasis potensi ekonomi lokal	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan yang Optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	4,93 %	5,93 %	120 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten melebihi target dengan penilaian kinerja sebesar 120 %, sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan **tercapai** dan memiliki kriteria penilaian kinerja capaian sasaran strategis yang **Sangat Tinggi**.

Dalam sub bab ini akan disajikan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang

dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan yang Optimal**, dengan indikator kinerja sasaran strategis **Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan**, sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Pergub Provinsi Banten nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Formulasi perhitungan Indeks Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Formulasi
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan yang Optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	$\frac{(\text{Produksi Perikanan Tahun } n - \text{Produksi Perikanan Tahun } n-1) / \text{Produksi Perikanan Tahun } n-1 \times 100\%}{100\%}$

Laju pertumbuhan sektor perikanan menggambarkan peningkatan produksi perikanan dari tiap tahun. Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya.

Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif, tetapi bisa juga berupa pengamatan kualitatif. Indikator tersebut menentukan bagaimana

kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi, tanpa menjelaskan secara spesifik suatu tingkat pencapaian tertentu.

Berikut disajikan uraian atas Capaian indikator kinerja program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Tahun 2022 :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	%
Program Tata Kelola	Capaian Sakip	A	A	100 %
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan	8,61 %	1,38 %	16,03 %
	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Usaha Kepelabuhanan	100 %	100 %	100 %
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas Laut yang terawasi	35 %	35 %	100 %
Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Nilai Tukar Nelayan	120	102,7	85,58 %
	Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Banten	100 %	100 %	100 %
	Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Banten	100 %	100 %	100 %

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Benih Ikan Laut dan Payau	1,5 Milyar Ekor	7,8 Milyar Ekor	520 %
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Ruang Lingkup Pengujian dan Mutu Hasil Perikanan pada ISO 17025	1 Parameter	1 parameter	100 %

A. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Tata Kelola

Capaian indikator tahun 2022 mencapai angka 100%. Angka ini merupakan pencapaian 100% dari target kinerja sebesar 100%. Unsur-unsur yang dinilai dalam indeks kepuasan masyarakat ini meliputi respon pengaduan, sarana dan prasarana, sikap petugas, profesional ASN, kualitas hasil pelayanan, respon kecepatan pelayanan, prosedur, dan pelayanan teknis.

B. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu Persentase Produksi Perikanan dengan Persentase Kinerja Pelayanan Kepelabuhanan. Berdasarkan data sementara bahwa capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 71.401 ton dimana capaian ini melebihi produksi perikanan tangkap pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 70.429 ton.

Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 972 ton ini hanya mengalami peningkatan sebesar 1,38 persen, sedangkan target peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 yaitu 8,61%. Ketidaktercapaian indikator peningkatan persentase produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 ini dikarenakan belum sesuainya standar sarana dan prasarana fasilitas pelabuhan perikanan di provinsi Banten yang tersebar di 3 wilayah pengelolaan perikanan yaitu WPP 712 Laut Jawa, WPP 572 Selat Sunda serta WPP 573 Samudera Hindia. Rendahnya kesadaran masyarakat perikanan terhadap kepemilikan dokumen perizinan usaha perikanan tangkap serta masih beroperasinya sistem praktik jual beli ke juragan menjadi salah satu beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya peningkatan produksi di bidang perikanan tangkap.

Aspek persentase capaian kinerja pelayanan kepelabuhanan dikategorikan sangat tinggi, karena beberapa pelayanan terkait operasional kepelabuhanan maupun kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dapat mudah dimanfaatkan oleh nelayan dengan hadirnya pelabuhan perikanan induk Provinsi Banten di masing-masing WPP yaitu Pelabuhan Perikanan Cituis (WPP 712 pengelola KCD Utara), Pelabuhan Perikanan Labuan (WPP 572 pengelola UPTD PPP Labuan) dan Pelabuhan Perikanan Binuangeun (WPP 573 pengelola KCD Selatan). Penerbitan dokumen surat persetujuan berlayar, rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi kapal perikanan <30 GT serta pengelolaan pusat informasi pelabuhan perikanan, merupakan beberapa hasil kinerja dari pelayanan kepelabuhanan perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan setempat.

Pemecahan masalah terkait tidak tercapainya persentase produksi perikanan tangkap dapat diminimalisir antara lain :

- ✓ Melakukan revitalisasi secara bertahap terhadap fasilitas pokok, fungsional dan penunjang di pelabuhan perikanan;
- ✓ Pencatatan data produksi perikanan tangkap berbasis elektronik secara berkala baik di non pelabuhan perikanan maupun pelabuhan perikanan;
- ✓ Fasilitasi pelayanan dokumen usaha perikanan tangkap bagi nelayan kecil;
- ✓ Penguatan kelembagaan kelompok usaha bersama perikanan tangkap sebagai sarana pembinaan awal bagi nelayan.

Dokumentasi Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 sebagai berikut :



Revitalisasi Pabrik Es Pelabuhan Perikanan Binuangun



Revitalisasi Jalan dan Drainase Pelabuhan Perikanan Binuangun

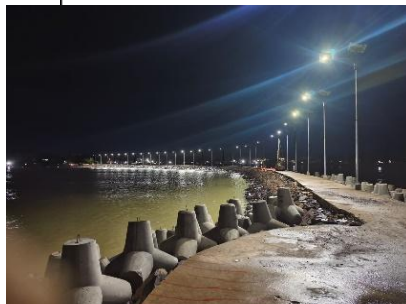
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban



Pembangunan Kios Pelabuhan Perikanan Binuangeun



Pembangunan Docking Tahap 2 Pelabuhan Perikanan Binuangeun



Pembangunan Breakwater sebelah timur dan Pemasangan tetrapod dan Sollar cell di Pelabuhan Perikanan Cikeusik



Pembangunan Dermaga dan TPI Higienis di Pelabuhan Perikanan Cikeusik

C. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan

Indikator Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan adalah luas laut yang terawasi dibagi luas perairan laut Provinsi Banten.

Jumlah luas laut yang terawasi diperoleh dari rekapitulasi luas cakupan kapal perikanan yang terawasi pada saat patroli laut dalam satu tahun. Pada tahun 2022, capaian indikator Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dikategorikan sangat tinggi, karena luas laut yang terawasi berjumlah kurang lebih 4.000 km² atau sekitar 35% dari luas perairan laut Provinsi Banten yang berjumlah 11.134,22 km².

Faktor yang mendukung tercapainya output Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan ini diantaranya yaitu sinergitas yang baik dengan stakeholder pengawas perikanan UPT KKP Karangantu maupun Polair dan memaksimalkan peran kelembagaan kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) perikanan sebagai ujung tombak pengawasan sumberdaya kelautan di Perairan Provinsi Banten.

D. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Nilai Tukar Nelayan serta persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha di wilayah Provinsi Banten. Aspek nilai tukar nelayan menunjukkan perbandingan pendapatan nelayan yang diterima dengan pengeluaran kebutuhan nelayan. Nilai tukar nelayan

diatas poin 100 menunjukkan adanya kelebihan pendapatan yang diterima sehingga dapat mensejahterakan kehidupan nya.

Target NTN untuk tahun 2022 adalah sebesar 120 poin namun realisasi sementara dari data BPS Provinsi hanya berkisar 102,7 poin. Untuk itu DKP melaksanakan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat menjadi daya ungkit peningkatan nilai tukar nelayan yaitu pembinaan kepada masyarakat pesisir berupa pelatihan kekerasan maupun pemberian atraktor cumi serta rehabilitasi kawasan pesisir melalui transplantasi terumbu karang dan penanaman mangrove.

Untuk indikator aspek persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha kelautan di wilayah Provinsi Banten diampu oleh Kantor Cabang Dinas Wilayah Selatan dan Utara Provinsi Banten. Kegiatan yang dilakukan pada kedua cabang dinas tersebut adalah pelayanan cek fisik kapal perikanan untuk kapal diatas 10 GT dan penerbitan tanda daftar kapal perikanan bagi kapal dibawah 10 GT. Kedua kegiatan tersebut merupakan kebijakan pelimpahan yang diberikan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten kepada masing-masing unit kepala cabang dinas kelautan dan perikanan wilayah utara maupun selatan agar nelayan yang jauh lokasi dari kantor induk dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan tersebut di kantor cabang dinas terdekat.

Data capaian jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang terlayani oleh KCD wilayah Utara sebanyak 48 dokumen, sedangkan capaian untuk rekomendasi penyaluran BBM

Bersubsidi sebanyak 1.107 kapal perikanan yang tersebar di 5 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBU-N). Sedangkan data capaian jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang terlayani oleh KCD wilayah Selatan sebanyak 41 dokumen, sedangkan capaian untuk rekomendasi penyaluran BBM Bersubsidi sebanyak 639 kapal perikanan yang tersebar di 4 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBU-N).

E. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Capaian indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah produksi benih ikan payau dan laut dengan target 1,5 milyar benih ikan. Pada Tahun 2022, produksi benih ikan payau dan laut mencapai 7,8 milyar benih ikan sehingga melampaui target sebesar 520%. Mayoritas komoditi benih yang dihasilkan pada Tahun 2022 adalah dari udang vanamei yang dihasilkan beberapa *hatchery* di sepanjang perairan wilayah utara kabupaten serang.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam mendukung produksi benih ikan yang berkualitas dilaksanakan melalui produksi UPTD PPBAPL dan disalurkan ke beberapa kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Pada tahun 2022, capaian kinerja UPTD PPBAPL telah menyalurkan sebanyak 3.2640.000 benih ikan dengan rincian ke Kota Serang sebanyak 183.500 benih untuk 17 pokdakan, Kabupaten Serang sebanyak 292.600 benih untuk 29 pokdakan, Kabupaten Pandeglang sebanyak

1.251.400 benih untuk 101 pokdakan, Kabupaten Lebak sebanyak 1.202.500 benih untuk 84 pokdakan, Kota Tangerang Selatan sebanyak 42.000 benih untuk 4 pokdakan dan Kabupaten Tangerang sebanyak 293.000 untuk 10 pokdakan.

Dokumentasi capaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai berikut :



Penyerahan Bantuan Benih Ikan oleh Pj. Gubernur Banten dan Ketua Komis II DPRD Banten

F. Capaian Kinerja Outcome atas indicator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Capaian indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah persentase usaha perikanan yang bersertifikat SNI serta jumlah ruang lingkup pengujian dan mutu hasil perikanan pada ISO 17025. Aspek capaian pengujian mutu hasil perikanan dilakukan oleh UPTD PPMHP berupa parameter uji seperti uji TPC, E.Coli, Coliform, Salmonela, organoleptic, parasite maupun uji air, protein, dan abu.

Capaian pada tahun 2022, jumlah sampel yang diuji adalah 1.376 sampel uji dengan rincian uji TPC sebanyak 195 sampel, uji E. Coli sebanyak 141 sampel, uji Coliform sebanyak 102 sampel, uji Salmonella sebanyak 152 sampel, uji organoleptic sebanyak 24 sampel, uji formalin sebanyak 147 sampel, uji parasite sebanyak 4 sampel, uji kualitas air sebanyak 12 sampel, uji protein sebanyak 2 sampel dan uji abu sebanyak 4 sampel. Biaya uji sampel yang dihasilkan oleh UPTD PPMHP dimasukkan kedalam retribusi daerah dengan capaiannya untuk tahun 2022 sebesar Rp. 129.950.000,-.

Capaian pada Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga berkaitan dengan sistem keamanan jaminan mutu pangan berupa penerbitan Sertifikasi Kelaikan Pengolah (SKP). Berdasarkan peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman disebutkan bahwa acuan persyaratan sertifikasi produk nasional Indonesia sektor kelautan dan perikanan mengacu pada beberapa peraturan mengenai sistem jaminan mutu pangan sektor kelautan dan perikanan salah satunya yaitu mengenai Sertifikat Kelaikan Pengolah (SKP).

Upaya yang dilakukan untuk capaian indikator pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan juga berkaitan erat dengan pengentasan stunting dan gizi buruk, yang menjadi salah satu isu strategis dan prioritas di Provinsi Banten. Kegiatan tersebut yaitu:

1. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) yang

dilakukan sebanyak 5 lokasi (1 Kabupaten Serang, 2 Kabupaten Pandeglang, 1 Kota Serang dan 1 Kabupaten Lebak) dengan pemberian percontohan budidaya ikan dalam ember (BUDIKDAMBER) serta olahan ikan;

2. Diversifikasi olahan ikan yang dilakukan sebanyak 2 lokasi (1 Kabupaten Serang dan 1 Kabupaten Pandeglang) dengan melakukan pelatihan olahan ikan dari bahan baku ikan nila untuk dijadikan nugget, kaki naga serta pempek.

Dokumentasi capaian kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai berikut :



Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Pembinaan Diversifikasi Produk Olahan Ikan



Kegiatan Pemberian Budikdamber oleh Pj Gubernur Banten dan Ibu PKK Provinsi Banten

3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selain berisi tentang tingkat keberhasilan dan kegagalan yang tertuang dalam perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih mendalam dimana pengukuran tingkat capaian kinerja pada tahun 2022 dilakukan dengan cara :

3.2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.5

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Beberapa Tahun Terakhir

Program	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2021	Target 2020	Target 2019	Capaian 2022	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Program Tata Kelola	Capaian Sakip	A	A	A	A	A	A	A	A
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan	8,61 %	8,23 %	8,16 %	8,08 %	1,38 %	1,5 %	8,16 %	8,08 %
	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Usaha Kepelabuhanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas Laut yang terawasi	35 %	30 %	25 %	20 %	35 %	35 %	25 %	20 %
Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Nilai Tukar Nelayan	120	119	118	117	102,7	100,99	98,37	108,04
	Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Banten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

	Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Banten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Benih Ikan Laut dan Payau	1,5 Milyar Ekor	1,25 Milyar Ekor	1 Milyar Ekor	1 Milyar Ekor	8 Milyar Ekor	7,4 Milyar Ekor	6 Milyar Ekor	5,5 Milyar Ekor
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Ruang Lingkup Pengujian dan Mutu Hasil Perikanan pada ISO 17025	1 Parameter	1 Parameter	1 Parameter	1 Parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter

Pada tabel di atas menunjukkan terdapat penurunan dari persentase kenaikan produksi perikanan tangkap dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Hal ini disebabkan faktor pandemi covid-19 yang masih terjadi pada tahun 2021 sehingga mengurangi aktivitas usaha perikanan tangkap. Namun untuk indikator nilai tukar nelayan pada masa pandemi mengalami peningkatan karena hasil perikanan budidaya maupun produk olahan ikan banyak diminati disebabkan oleh kesadaran masyarakat tentang gizi ikan pada saat pandemi sangat tinggi.

Capaian pelayanan kepelabuhanan, uji sampel hasil perikanan serta persentase usaha kelautan yang direkomendasikan baik wilayah utara maupun selatan Banten pada table diatas juga terlihat konsisten selalu tercapai. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam hal melayani masyarakat maupun *stakeholder* perikanan.

Berdasarkan tabel diatas pula, capaian pengawasan pengelolaan ruang laut di Provinsi Banten tiap tahun nya juga selalu tercapai dan konsisten. Hal ini dikarenakan adanya sinergi dalam pelaksanaan patroli terpadu yang berkesinambungan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dengan berbagai instansi terkait pengawasan di sektor kelautan dan perikanan seperti Satker Pengawas KKP Karangantu dan Polair Banten. Selain itu peran kelompok masyarakat pengawas atau yang lebih dikenal dengan nama pokmaswas dapat membatu sebagai ujung tombak pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dari berbagai macam pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Banten.

3.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut. Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran strategis sekaligus IKU Dinas yaitu “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan yang Optimal” dengan Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan capaian kinerja 120 % dengan predikat **Sangat Baik**.

a. Faktor – faktor Pendorong keberhasilan diantaranya :

- Tingginya permintaan terhadap produk hasil perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan;
- Tingginya permintaan dari unit pengolahan dan konsumen terhadap produk olahan yang sudah mempunyai jaminan mutu dan keamanan pangan yang baik;
- Dukungan pemerintah yang kuat bagi kapal perikanan skala kecil melalui bantuan BBM solar bersubsidi;
- Peningkatan permintaan yang terus meningkat terhadap ikan hasil budidaya baik lokal, nasional maupun global;
- Integrasi yang baik dengan BAPPEDA Provinsi Banten dan KKP untuk peningkatan kualitas fasilitas pokok dan

fungsional di masing-masing pelabuhan perikanan yang ada;

- Tingginya permintaan uji sampel olahan hasil perikanan dari UMKM, industri pengolahan serta kelompok pemasar produk olahan perikanan di Provinsi Banten;
- Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik pada kelompok perikanan budidaya untuk peningkatan produksi benih dan induk.

b. Upaya yang telah dilakukan :

- Pembuatan dokumen perencanaan yang baik bagi pengembangan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan perikanan;
- Revitalisasi sarana dan prasarana baik pra maupun pasca produksi perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan;
- Fasilitasi akses permodalan serta perizinan dokumen usaha perikanan;
- Pemberdayaan masyarakat pesisir;
- Rehabilitasi Kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil;
- Pengawasan terpadu terhadap pengelolaan ruang laut di provinsi Banten.

3.2.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD

Pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap capaian indikator sasaran laju pertumbuhan sektor perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada tahun 2022 diantaranya yaitu :

- Implementasi Perda Provinsi Banten No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui pelatihan kekerangan dan atraktor cumi bagi masyarakat pesisir serta pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui diversifikasi produk olahan hasil perikanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir;
- Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Induk di Provinsi Banten untuk peningkatan persentase produksi perikanan tangkap melalui Revitalisasi bertahap Pelabuhan Perikanan Binuangeun dan Cikeusik serta penganggaran pada Tahun 2023 melalui DAK untuk revitalisasi Pelabuhan Perikanan Cituis.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar **Rp. 70.111.602.895,-** atau **88,19%** dari total pagu anggaran **Rp. 79.502.451.000,-**. Adapun rincian realisasi berupa belanja operasi sebesar 94,11 % (realisasi keuangan Rp. 46.929.485.135,- dari pagu anggaran Rp. 49.866.393.600,-) sedangkan belanja modal sebesar 78,22 % (realisasi keuangan Rp. 23.182.117.759,- dari pagu Rp. 29.636.057.400,-). Capaian belanja modal pada tahun 2022 yang rendah disebabkan adanya pekerjaan pembangunan pabrik es di Pelabuhan Perikanan Binuangeun yang tidak direalisasikan. Hal ini menjadi penyebab rendahnya serapan realisasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Tahun 2022.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten terkait pembangunan pabrik es tersebut diantaranya sebagai berikut :

Selama masa pelaksanaan pekerjaan, CV. Golden Perkasa telah mendapatkan instruksi/teguran baik dari PPK maupun Konsultan Pengawasan, sebagaimana berikut :

- Surat PPK Nomor 027/010/ST-1/PPK.02/DKP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Teguran Ke-satu;
- Surat PPK Nomor 027/010/ST-2/PPK.02/DKP/2022 tanggal 9 November 2022 perihal Teguran Ke-dua;
- Surat PPK Nomor 027/0236/SCM/PPK.02/DKP/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Rapat Show Cause Meeting (SCM);
- Surat Team Leader PT. Inkoneksi Izi Konsultan Nomor :../ST/IZI/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 perihal Surat Teguran.
- Surat PPK Nomor 027/0272-2/SCM-II/PPK.02/DKP/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Rapat Show Cause Meeting (SCM) Ke-dua.
- Surat PPK Nomor 027/0268/RPK/PPK.02/DKP/2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal Rapat Pembahasan Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- Surat PPK Nomor 027/0281/SCM-III/PPK.02/DKP/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Rapat Show Cause Meeting (SCM) Ke-tiga.

Realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2022 untuk lebih detailnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 3.9
Target dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran		
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	3	6,00	7	11	12	13,00	14
	BELANJA OPERASI			49.866.393.600,00	62,72	46.929.485.135,00			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			41.284.481.275,00	51,93	39.333.690.989,00			
	Dinas Kelautan dan Perikanan (UNIT INDUK)								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			365.000.000,00	0,46	348.599.000,00	95,51	16.401.000,00	4,49
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	184.296.500,00	0,23	170.141.500,00	92,32	14.155.000,00	7,68
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.900.000,00	0,01	11.900.000,00	100,00	-	-
c	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.200.000,00	0,02	12.200.000,00	100,00	-	-

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	7.700.000,00	0,01	7.700.000,00	100,00	-	-
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.900.000,00	0,01	6.900.000,00	100,00	-	-
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	23.310.000,00	0,03	23.310.000,00	100,00	-	-
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	118.693.500,00	0,15	116.447.500,00	98,11	2.246.000,00	1,89
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.378.561.800,00	38,21	29.394.234.419,00	96,76	984.327.381,00	3,24
a	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	29.499.014.000,00	37,10	28.645.322.303,00	97,11	853.691.697,00	2,89
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	775.400.000,00	0,98	667.625.000,00	86,10	107.775.000,00	13,90
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.475.000,00	0,01	8.875.000,00	93,67	600.000,00	6,33
d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	32.564.000,00	0,04	15.804.000,00	48,53	16.760.000,00	51,47
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.148.800,00	0,02	11.660.000,00	95,98	488.800,00	4,02
f	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	9.265.600,00	0,01	8.760.000,00	94,54	505.600,00	5,46
g	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	20.347.200,00	0,03	20.279.736,00	99,67	67.464,00	0,33

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

h	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	20.347.200,00	0,03	15.908.380,00	78,18	4.438.820,00	21,82
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			27.470.000,00	0,03	21.866.020,00	79,60	5.603.980,00	20,40
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.450.000,00	0,00	2.287.640,00	93,37	162.360,00	6,63
b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	5.700.000,00	0,01	4.953.880,00	86,91	746.120,00	13,09
c	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.320.000,00	0,02	14.624.500,00	75,70	4.695.500,00	24,30
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.727.500,00	0,02	19.727.500,00	100,00	-	-
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Dokumen	1 Dokumen	19.727.500,00	0,02	19.727.500,00	100,00	-	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			389.864.648,00	0,49	336.423.466,00	86,29	53.441.182,00	13,71
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	10.440.000,00	0,01	10.429.936,00	99,90	10.064,00	0,10
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket	76.350.000,00	0,10	75.878.291,00	99,38	471.709,00	0,62
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	16.706.000,00	0,02	16.686.133,00	99,88	19.867,00	0,12
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	75.000.000,00	0,09	43.076.582,00	57,44	31.923.418,00	42,56

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	4 paket	130.530.000,00	0,16	130.475.105,00	99,96	54.895,00	0,04
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	80.838.648,00	0,10	59.877.419,00	74,07	20.961.229,00	25,93
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	0,00	0,00	-	-
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
b	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.612.239.100,00	5,80	4.383.457.086,00	95,04	228.782.014,00	4,96
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Paket	1 Paket	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	329.460.000,00	0,41	276.277.029,00	83,86	53.182.971,00	16,14
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	0,01	4.260.000,00	60,86	2.740.000,00	39,14
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Bulan	13 Bulan	4.275.679.100,00	5,38	4.102.920.057,00	95,96	172.759.043,00	4,04
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.207.210.148,00	1,52	1.135.898.442,00	94,09	71.311.706,00	5,91

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit	314.890.000,00	0,40	286.142.273,00	90,87	28.747.727,00	9,13
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Paket	9 Paket	646.490.000,00	0,81	601.920.027,00	93,11	44.569.973,00	6,89
c	Pemeliharaan Mebel	2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	-	-
d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	510 m2	510 m2	62.914.148,00	0,08	67.878.790,00	107,89	- 4.964.642,00	- 7,89
e	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	200 m2	200 m2	3.895.750,00	0,00	3.878.300,00	99,55	17.450,00	0,45
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3, 6, 15 Unit	3, 6, 15 Unit	103.020.000,00	0,13	101.403.800,00	98,43	1.616.200,00	1,57
g	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	74.000.250,00	0,09	72.675.252,00	98,21	1.324.998,00	1,79
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara									
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah			133.534.000,00	0,17	123.049.580,00	92,15	10.484.420,00	7,85
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,04	29.806.000,00	99,35	194.000,00	0,65
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	0,03	19.282.000,00	96,41	718.000,00	3,59
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,03	19.700.000,00	98,50	300.000,00	1,50

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	5.000.000,00	0,01	4.946.780,00	98,94	53.220,00	1,06
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	42.500.000,00	0,05	34.414.800,00	80,98	8.085.200,00	19,02
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	16.034.000,00	0,02	14.900.000,00	92,93	1.134.000,00	7,07
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.618.000,00	0,00	3.518.000,00	0,00	100.000,00	0,00
a	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	4 Paket	4 Paket	3.618.000,00	0,00	3.518.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78.590.000,00	0,10	54.999.571,00	69,98	23.590.429,00	30,02
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	78.590.000,00	0,10	54.999.571,00	69,98	23.590.429,00	30,02
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			906.727.000,00	1,14	737.773.415,00	81,37	168.953.585,00	18,63
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,3 Unit	4,3 Unit	81.500.000,00	0,10	62.515.800,00	76,71	18.984.200,00	23,29
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Paket	6 Paket	25.500.000,00	0,03	25.375.000,00	99,51	125.000,00	0,49
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2985 M2, 2 Paket	2985 M2, 2 Paket	799.727.000,00	1,01	649.882.615,00	81,26	149.844.385,00	18,74
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan									

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

13	Administrasi Umum Perangkat Daerah			145.000.000,00	0,18	141.532.000,00	97,61	3.468.000,00	2,39
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,03	19.875.000,00	99,38	125.000,00	0,63
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	20.000.000,00	0,03	19.434.000,00	97,17	566.000,00	2,83
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,03	19.800.000,00	99,00	200.000,00	1,00
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	20.000.000,00	0,03	17.800.000,00	89,00	2.200.000,00	11,00
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	0,06	49.853.000,00	99,71	147.000,00	0,29
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	15.000.000,00	0,02	14.770.000,00	98,47	230.000,00	1,53
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			85.180.000,00	0,11	6.978.000,00	8,19	78.202.000,00	91,81
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
b	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3 Paket	3 Paket	85.180.000,00	0,11	6.978.000,00	8,19	78.202.000,00	91,81
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.150.000,00	0,05	33.112.345,00	91,60	3.037.655,00	8,40
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	15.150.000,00	0,02	12.112.345,00	79,95	3.037.655,00	20,05

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	21.000.000,00	0,03	21.000.000,00	100,00	-	-
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			469.312.000,00	0,59	361.334.500,00	76,99	107.977.500,00	23,01
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	24.585.000,00	0,03	24.357.000,00	99,07	228.000,00	0,93
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	36.500.000,00	0,05	35.494.000,00	97,24	1.006.000,00	2,76
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7, 2, 1,2, 2 Unit	7, 2, 1,2, 2 Unit	26.363.000,00	0,03	22.647.500,00	85,91	3.715.500,00	14,09
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,1 Paket	4,1 Paket	381.864.000,00	0,48	278.836.000,00	73,02	103.028.000,00	26,98
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan									
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah			445.823.000,00	0,56	424.292.465,00	95,17	21.530.535,00	4,83
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	100,00	-	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket, 2 Unit	1 Paket, 2 Unit	236.713.000,00	0,30	233.747.620,00	98,75	2.965.380,00	1,25
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	6.734.000,00	0,01	6.374.000,00	94,65	360.000,00	5,35

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan, 1 Tahun Anggaran	12 Bulan, 1 Tahun Anggaran	103.440.000,00	0,13	101.880.000,00	98,49	1.560.000,00	1,51
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	35.600.000,00	0,04	35.600.000,00	100,00	-	-
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	60.076.000,00	0,08	43.430.845,00	72,29	16.645.155,00	27,71
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	100,00
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit, 1,2 Buah	1 Unit, 1,2 Buah	129.000,00	0,00	-	-	129.000,00	-
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			202.069.000,00	0,25	171.397.615,00	84,82	30.671.385,00	15,18
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	202.069.000,00	0,25	171.397.615,00	84,82	30.671.385,00	15,18
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385.390.000,00	0,48	367.944.080,00	95,47	17.445.920,00	4,53
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,2 Unit	1,2 Unit	40.570.000,00	0,05	40.525.500,00	99,89	44.500,00	0,11
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun anggaran, 2 Unit	1 Tahun anggaran, 2 Unit	69.820.000,00	0,09	54.179.650,00	77,60	15.640.350,00	22,40
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Paket	4 Paket	275.000.000,00	0,35	273.238.930,00	99,36	1.761.070,00	0,64

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut									
21	Administrasi Umum Perangkat Daerah			127.953.400,00	0,16	125.806.000,00	98,32	2.147.400,00	1,68
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	25.508.000,00	0,03	25.508.000,00	100,00	-	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	22.872.000,00	0,03	22.537.500,00	98,54	334.500,00	1,46
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	3 Paket	12.723.400,00	0,02	11.344.500,00	89,16	1.378.900,00	10,84
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun Anggaran	1 tahun Anggaran	18.500.000,00	0,02	18.500.000,00	100,00	-	-
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	35.000.000,00	0,04	34.566.000,00	98,76	434.000,00	1,24
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	13.350.000,00	0,02	13.350.000,00	100,00	-	-
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.150.000,00	0,09	68.500.000,00	97,65	1.650.000,00	2,35

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,5 Paket	2,5 Paket	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
b	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	0,09	68.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			345.628.679,00	0,43	270.787.471,00	78,35	74.841.208,00	21,65
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	345.628.679,00	0,43	270.787.471,00	78,35	74.841.208,00	21,65
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			473.320.000,00	0,60	444.733.250,00	93,96	28.586.750,00	6,04
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	33.410.000,00	0,04	31.017.000,00	92,84	2.393.000,00	7,16
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,1 Unit, 1 Tahun Anggaran	4,1 Unit, 1 Tahun Anggaran	120.000.000,00	0,15	97.581.250,00	81,32	22.418.750,00	18,68
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	11 Unit	11 Unit	7.910.000,00	0,01	7.910.000,00	100,00	-	-

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10, 2 Paket	10, 2 Paket	312.000.000,00	0,39	308.225.000,00	98,79	3.775.000,00	1,21
UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan									
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah			163.464.000,00	0,21	161.110.500,00	98,56	2.353.500,00	1,44
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,06	49.563.000,00	99,13	437.000,00	0,87
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	0,02	14.413.000,00	96,09	587.000,00	3,91
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,02	13.766.000,00	91,77	1.234.000,00	8,23
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun Anggaran	1 tahun Anggaran	14.964.000,00	0,02	14.964.000,00	100,00	-	-
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	0,05	39.999.500,00	100,00	500,00	0,00
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Anggaran	1 tahun Anggaran	28.500.000,00	0,04	28.405.000,00	99,67	95.000,00	0,33
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	0,00	-	-	-	-
a	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	0,00	-	-	-	-
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00	-	-	-	-

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.800.000,00	0,07	43.065.964,00	81,56	9.734.036,00	18,44
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun Anggaran	1 tahun Anggaran	52.800.000,00	0,07	43.065.964,00	81,56	9.734.036,00	18,44
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			159.570.000,00	0,20	153.550.300,00	96,23	6.019.700,00	3,77
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,6 Unit	3,6 Unit	134.470.000,00	0,17	131.950.300,00	98,13	2.519.700,00	1,87
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Paket	4 Paket	25.100.000,00	0,03	21.600.000,00	86,06	3.500.000,00	13,94
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
II	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			830.096.000,00	1,04	725.725.211,00			
Dinas Kelautan dan Perikanan (UNIT INDUK)									
29	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			247.100.000,00	0,31	203.566.000,00	82,38	43.534.000,00	17,62
a	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	99 Hektar	99 Hektar	126.800.000,00	0,16	84.968.500,00	67,01	41.831.500,00	32,99

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

b	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 Hektar	3 Hektar	72.100.000,00	0,09	70.893.000,00	98,33	1.207.000,00	1,67
c	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	48.200.000,00	0,06	47.704.500,00	98,97	495.500,00	1,03
30	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			162.230.000,00	0,20	137.717.211,00	84,89	24.512.789,00	15,11

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

a	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3 Dokumen	3 Dokumen	80.692.000,00	0,10	77.106.211,00	95,56	3.585.789,00	4,44
b	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar dan Gas Bumi	3 Dokumen	3 Dokumen	22.264.000,00	0,03	17.910.500,00	80,45	4.353.500,00	19,55
c	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	3 Dokumen	3 Dokumen	59.274.000,00	0,07	42.700.500,00	72,04	16.573.500,00	27,96
31	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			46.750.000,00	0,06	45.467.650,00	97,26	1.282.350,00	2,74
a	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	30.290.000,00	0,04	29.728.000,00	98,14	562.000,00	1,86
b	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	2.980.000,00	0,00	2.340.000,00	78,52	640.000,00	21,48

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

c	Peibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	13.480.000,00	0,02	13.399.650,00	99,40	80.350,00	0,60
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara									
32	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			74.186.000,00	0,09	70.970.000,00	95,66	3.216.000,00	4,34
a	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Hektar	2 Hektar	50.000.000,00	0,06	49.560.000,00	99,12	440.000,00	0,88
b	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	24.186.000,00	0,03	21.410.000,00	88,52	2.776.000,00	11,48
33	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			90.680.000,00	0,11	72.597.250,00	80,06	18.082.750,00	19,94
a	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	6 Dokumen	6 Dokumen	46.500.000,00	0,06	37.577.500,00	80,81	8.922.500,00	19,19

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

b	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam sistem kadaster laut	2 Dokumen	2 Dokumen	44.180.000,00	0,06	35.019.750,00	79,27	9.160.250,00	20,73
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan									
34	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			148.500.000,00	0,19	141.057.100,00	94,99	7.442.900,00	5,01
a	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Hektar	2 Hektar	128.500.000,00	0,16	122.127.100,00	95,04	6.372.900,00	4,96
b	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,03	18.930.000,00	94,65	1.070.000,00	5,35
35	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			60.650.000,00	0,08	54.350.000,00	89,61	6.300.000,00	10,39
a	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	4 Dokumen	4 Dokumen	43.650.000,00	0,05	40.800.000,00	93,47	2.850.000,00	6,53
b	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam sistem kadaster laut	2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000,00	0,02	13.550.000,00	79,71	3.450.000,00	20,29

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			4.042.842.910,00	5,09	3.526.332.984,00			
Dinas Kelautan dan Perikanan (UNIT INDUK)									
36	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			195.294.000,00	0,25	166.606.420,00	85,31	28.687.580,00	14,69
a	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00	0,08	50.874.420,00	78,27	14.125.580,00	21,73
b	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000,00	0,09	58.321.000,00	83,32	11.679.000,00	16,68

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

c	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3 Dokumen	3 Dokumen	60.294.000,00	0,08	57.411.000,00	95,22	2.883.000,00	4,78
37	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			293.000.000,00	0,37	281.815.440,00	96,18	11.184.560,00	3,82
a	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	0,06	38.900.000,00	81,04	9.100.000,00	18,96

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

b	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	50 Dokumen	50 Dokumen	160.000.000,00	0,20	138.923.770,00	86,83	21.076.230,00	13,17
c	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	12 Dokumen	12 Dokumen	85.000.000,00	0,11	51.995.835,00	61,17	33.004.165,00	38,83
38	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			3.380.448.910,00	4,25	2.932.305.894,00	86,74	448.143.016,00	13,26
a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	11 Dokumen, 6, 12 Paket	11 Dokumen, 6, 12 Paket	3.149.448.910,00	3,96	2.774.140.397,00	88,08	375.308.513,00	11,92

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

b	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	5 Dokumen	5 Dokumen	231.000.000,00	0,29	158.165.497,00	68,47	72.834.503,00	31,53
UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan									
39	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			72.200.000,00	0,09	51.263.100,00	71,00	20.936.900,00	29,00
a	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,04	29.896.600,00	85,42	5.103.400,00	14,58
a	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1,1 Dokumen, 1 Paket	1,1 Dokumen, 1 Paket	37.200.000,00	0,05	21.366.500,00	57,44	15.833.500,00	42,56
40	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			101.900.000,00	0,13	94.342.130,00	92,58	7.557.870,00	7,42
a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen, 2 Unit	1 Dokumen, 2 Unit	45.000.000,00	0,06	43.292.130,00	96,20	1.707.870,00	3,80
b	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	30 Dokumen	30 Dokumen	56.900.000,00	0,07	51.050.000,00	89,72	5.850.000,00	10,28
IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			174.406.000,00	0,22	152.089.744,00			
Dinas Kelautan dan Perikanan (UNIT INDUK)									

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

41	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			124.406.000,00	0,16	106.906.429,00	85,93	17.499.571,00	14,07
a	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	6 Dokumen	6 Dokumen	55.306.000,00	0,07	42.147.149,00	76,21	13.158.851,00	23,79
b	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	6 Dokumen	6 Dokumen	25.100.000,00	0,03	24.404.280,00	97,23	695.720,00	2,77

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

c	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	6 Dokumen	6 Dokumen	26.200.000,00	0,03	25.403.000,00	96,96	797.000,00	3,04
d	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	10 Dokumen	10 Dokumen	17.800.000,00	0,02	12.912.000,00	72,54	4.888.000,00	27,46
42	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			50.000.000,00	0,06	45.183.315,00	90,37	4.816.685,00	9,63

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

a	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	0,03	16.529.356,00	82,65	3.470.644,00	17,35
b	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	0,03	19.178.459,00	95,89	821.541,00	4,11
c	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	0,01	9.475.500,00	94,76	524.500,00	5,25

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			560.850.000,00	0,71	477.755.607,00			
Dinas Kelautan dan Perikanan (UNIT INDUK)									
43	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			60.000.000,00	0,08	42.082.996,00	70,14	17.917.004,00	29,86
a	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,03	14.919.500,00	74,60	5.080.500,00	25,40
b	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	0,04	27.163.496,00	77,61	7.836.504,00	22,39
c	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
44	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			155.000.000,00	0,19	143.971.602,00	92,88	11.028.398,00	7,12
a	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan	3 Dokumen	3 Dokumen	98.108.000,00	0,12	89.481.850,00	91,21	8.626.150,00	8,79

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

	dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								
b	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Dokumen	2 Dokumen	56.892.000,00	0,07	54.489.752,00	95,78	2.402.248,00	4,22
45	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			145.850.000,00	0,18	120.486.999,00	82,61	25.363.001,00	17,39
a	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,03	14.266.999,00	57,07	10.733.001,00	42,93
b	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	98.850.000,00	0,12	87.675.000,00	88,69	11.175.000,00	11,31
c	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000,00	0,03	18.545.000,00	84,30	3.455.000,00	15,70
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan									

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

46	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			100.000.000,00	0,13	82.100.500,00	82,10	17.899.500,00	17,90
a	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen	1 Dokumen	67.460.000,00	0,08	51.735.000,00	76,69	15.725.000,00	23,31
b	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	2 Dokumen	2 Dokumen	32.540.000,00	0,04	30.365.500,00	93,32	2.174.500,00	6,68
47	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100.000.000,00	0,13	89.113.510,00	89,11	10.886.490,00	10,89
a	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,13	89.113.510,00	89,11	10.886.490,00	10,89
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			2.973.717.415,00	3,74	2.713.890.600,00			
UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut									

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

48	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			368.599.000,00	0,46	286.228.000,00	77,65	82.371.000,00	22,35
a	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3 Dokumen	3 Dokumen	299.660.000,00		265.302.500,00	88,53	34.357.500,00	11,47
b	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	3 Dokumen	3 Dokumen	68.939.000,00		20.925.500,00	30,35	48.013.500,00	69,65
49	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			2.605.118.415,00	3,28	2.427.662.600,00	93,19	177.455.815,00	6,81
a	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	17 Paket	17 Paket	980.806.915,00	1,23	871.235.000,00	88,83	109.571.915,00	11,17
b	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13 Paket	13 Paket	1.576.795.000,00	1,98	1.532.192.600,00	97,17	44.602.400,00	2,83

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

c	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	47.516.500,00	0,06	24.235.000,00	51,00	23.281.500,00	49,00
	BELANJA MODAL			29.636.057.400,00	37,28	23.182.117.759,00			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.743.773.000,00	3,45	23.182.117.759,00			
	Dinas Kelautan dan Perikanan (UNIT INDUK)								
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			158.618.000,00	0,20	141.277.700,00	89,07	17.340.300,00	10,93
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	72.720.000,00	0,09	57892000,00	79,61	14.828.000,00	20,39
b	Pengadaan Mebel	2 Buah	2 Buah	7.336.000,00	0,01	6800000,00	92,69	536.000,00	7,31
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit	78.562.000,00	0,10	76585700,00	97,48	1.976.300,00	2,52
	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara								
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.282.000,00	0,39	304.873.400,00	98,26	5.408.600,00	1,74
a	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	4 Paket	4 Paket	310.282.000,00	0,39	304.873.400,00	98,26	5.408.600,00	1,74

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.980.000,00	0,05	39.600.000,00	96,63	1.380.000,00	3,37
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	40.980.000,00	0,05	39.600.000,00	96,63	1.380.000,00	3,37
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan									
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65.820.000,00	0,08	64.725.000,00	98,34	1.095.000,00	1,66
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Buah	6 Buah	30.000.000,00	0,04	29.600.000,00	98,67	400.000,00	1,33
b	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3 Paket	3 Paket	35.820.000,00	0,05	35.125.000,00	98,06	695.000,00	1,94
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan									
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			328.751.000,00	0,41	308.883.000,00	93,96	19.868.000,00	6,04
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit, 1,2 Buah	1 Unit, 1,2 Buah	328.751.000,00	0,41	308.883.000,00	93,96	19.868.000,00	6,04
UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut									
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.347.000,00	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00	100,00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	3 Paket	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00	100,00
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.621.475.000,00	2,04	1.310.634.057,00	80,83	310.840.943,00	19,17
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,5 Paket	2,5 Paket	429.441.000,00	0,54	422.410.000,0	98,36	7.031.000,00	1,64
b	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Paket	4 Paket	281.404.000,00	0,35	257.508.747,0	0,00	23.895.253,00	-
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Paket	2 Paket	910.630.000,00	1,15	630.715.310,0	69,26	279.914.690,00	30,74
UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan									

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			115.500.000,00	0,15	112.764.320,00	97,63	2.735.680,00	2,37
a	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3 Paket	3 Paket	35.500.000,00	0,04	34.562.320,00	97,36	937.680,00	2,64
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	0,10	78.202.000,00	97,75	1.798.000,00	2,25
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			101.000.000,00	0,13	99.215.000,00	98,23	1.785.000,00	1,77
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	101.000.000,00	0,13	99.215.000,00	98,23	1.785.000,00	1,77
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			26.892.284.400,00	33,83	20.800.145.282,00			
Dinas Kelautan dan Perikanan (UNIT INDUK)									
10	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			26.729.484.400,00	33,62	20.638.973.282,00	77,21	6.090.511.118,00	22,79

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	11 Dokumen, 6, 12 Paket	11 Dokumen, 6, 12 Paket	26.729.484.400,00	33,62	20.638.973.282,00	77,21	6.090.511.118,00	22,79
b	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-
UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan									
11	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			162.800.000,00	0,20	161.172.000,00	99,00	1.628.000,00	1,00
a	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1,1 Dokumen, 1 Paket	1,1 Dokumen, 1 Paket	162.800.000,00	0,20	161.172.000,00	99,00	1.628.000,00	1,00
JUMLAH				79.502.451.000,00	100	70.111.602.894,00	88,19	9.390.848.106,00	11,81

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Banten. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban pengukuran kinerja dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen pelaksanaan, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas.

Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan